

**IMPLEMENTASI DISKRESI DALAM PENGELOLAAN TENAGA
HONORER DI PEMERINTAHAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

Oleh:

Sitti Aisyah¹, Mailinda Eka Yuniza²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dalam pengelolaan tenaga honorer di Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan mengetahui faktor pendukung diskresi dalam pengelolaan tenaga honorer Oleh Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu pencarian dan pengumpulan data serta dokumen yang berkaitan dengan diskresi. Data diperoleh dengan wawancara, studi kepustakaan dan dokumen, yang selanjutnya dianalisis dan dituangkan dalam bentuk kata-kata sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang obyek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi diskresi dalam pengelolaan tenaga honorer telah dilakukan dengan baik sesuai dengan syarat, tujuan dan prosedur penggunaan diskresi sebagaimana yang diatur dalam UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Faktor pendukung diskresi adalah adanya kebutuhan yang mendesak di bidang pelayanan dasar yang harus segera diatasi, serta adanya dukungan dari Gubernur, anggota DPRD, dan ketersediaan APBD.

Kata kunci: *Diskresi, Tenaga Honorer, Badan Kepegawaian Daerah*

¹ Mahasiswi Magister Hukum Kenegaraan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

**IMPLEMENTATION OF DISCRETION IN HONORARY EMPLOYMENT
MANAGEMENT IN THE REGIONAL GOVERNMENT OF SPECIAL
REGION YOGYAKARTA**

By:

Sitti Aisyah³, Mailinda Eka Yuniza⁴

ABSTRACT

This research aims to find out and observe the implementation and its supporting elements of discretion of Regional Civil Service Agency in honorary employee in Regional Government, DIY.

The method of descriptive qualitatively is applied in this research by finding and collecting data in terms of ideas and documents which deals with discretion of Regional Civil Service Agency. The method used are interview and library research. Afterward, the data is explained descriptively to explicate the object of research.

The result of research shows that the implementation of discretion of honorary employment management has been working well based on condition, objective, and its procedure as specified in UU No. 30 Tahun 2014 of Government Administration. The supporting elements are basic service should be provided completely by Regional Government, Regional Representatives and Local Government Budget.

Keywords: *Discretion, Honorary employee, Regional Civil Service Agency*

³ Student Master the State Law, Faculty Of Law, University of Gadjah Mada, Yogyakarta.

⁴ Lecturer in Administrative Law, University of Gadjah Mada, Yogyakarta.